

Pengaruh Pengetahuan Dan Insentif Pajak Terhadap Kinerja Umkm Berkelanjutan Dengan Sikap Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Nur Arinah¹, Irwansyah², Dian Urna Fasihat³

Department of Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

Pengetahuan Pajak,

Insentif Pajak,

Sikap Pajak,

Kinerja UMKM Berkelanjutan,

Theory of Planned Behavior

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akibat dari pemahaman mengenai pajak, pemberian insentif pajak, serta sikap kepada pajak terhadap keberlanjutan kinerja UMKM di wilayah Kabupaten Dompu. Pendekatan Teori Perilaku Terencana (TPB) digunakan sebagai landasan teoretis yang mendasari penelitian ini adalah. Sebanyak 75 pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan menjalankan usahanya di kawasan pasar atas dalam penelitian, pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh valid dan relevan. penyebaran kuesioner serta dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda serta analisis regresi moderasi (MRA) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 21. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independent pengetahuan pajak, insentif Pajak, dan sikap terhadap pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang berkelanjutan. Nilai Adjusted R² sebesar 0,675 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 67,5% variabilitas dari kinerja UMKM. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan, menyalurkan insentif secara tepat sasaran, dan membentuk sikap positif terhadap pajak demi mendukung keberlanjutan usaha UMKM

This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax incentives, and tax attitudes on the sustainable performance of MSMEs in Dompu Regency. The research adopts The Theory of Planned Behavior (TPB) forms the foundation of the conceptual framework. A total of 75 MSME operators selected based on specific criteria such as having a Taxpayer Identification Number (NPWP) and operating within the Pasar Atas area were involved as respondents. Data collection was conducted using questionnaires, and the data were analyzed through multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA) using SPSS version 21. The findings reveal that all three independent variables general Tax Knowledge, tax incentives, and tax attitudes have a significant and positive impact on sustainable MSME performance. The refined R-squared value is 0.675 indicates that The model accounts for 67.5% of the variation in MSME performance. These results underscore the importance of improving tax literacy, providing well-targeted tax incentives, and fostering positive tax attitudes to support the long-term growth and sustainability of MSMEs

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nur Arinah

Department of Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia,

Jalan Syech Muhammad, Jl. Lkr. Utara Sawete Bali I, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Bar. 84216

Email: nurarinah426@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Pengusaha UMKM yaitu tercatat mencapai 65 juta dan akan terus bertambah setiap tahunnya, hal ini merupakan hal yang baik bagi perekonomian negara dan pemerintah ikut mendukung pertumbuhan UMKM. Mulai dari penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta orang dan peningkatan produk domestik bruto mencapai 60% pada tahun 2019 (Farina & Opti, 2023). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak hanya karyawan di perusahaan saja yang harus membayar pajak tetapi juga pemilik UMKM harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Pada era teknologi yang semakin canggih, penggunaan internet pun juga bisa digunakan untuk UMKM melakukan kewajiban perpajakannya Pengetahuan perpajakan mencakup segala hal yang dapat dipahami dan diketahui terkait dengan aspek hukum dalam perpajakan, baik dari sisi materiil maupun formal (Mardiasmo, 2016). Secara umum, pemahaman tentang perpajakan mencerminkan sejauh mana seseorang mengerti konsep-konsep dasar pajak, yang meliputi aspek perpajakan serta pengetahuan keuangan yang diperlukan oleh wajib

pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Pratama, 2018). Rodri Guez (2018) menyatakan bahwa pemahaman yang memadai terhadap aturan perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka pembayaran pajak.

Pengertian mengenai sistem pajak salah satu aspek krusial dalam mendukung sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan berperan dalam membentuk perilaku Wajib Pajak dalam sistem self assessment (Saad, 2014). Hal ini disebabkan oleh tuntutan bagi Wajib Pajak untuk mampu secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penguasaan yang memadai terhadap aspek perpajakan menjadi hal yang penting. Tanpa pengetahuan yang memadai, prinsip self assessment tidak dapat diterapkan secara optimal, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan sendiri mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sistem perpajakan, serta fungsi dari pajak itu sendiri (Sari, 2017). Dari penjelasan hal itu bahwa Semakin mendalam wawasan perpajakan Seiring meningkatnya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin besar pula kemungkinan mereka agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman tentang pajak berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, keterbatasan informasi dan pengetahuan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Di Kabupaten Dompu, insentif pajak bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pelaku usaha. Insentif pajak diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke daerah terutama dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya insentif, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Insentif ini juga ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pariwisata dan industri lokal. Pemerintah kabupaten Dompu melalui BAPPENDA melakukan sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme insentif pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan insentif pajak untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah (Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2023).

Sikap pajak di Kabupaten dompu mencakup pengaturan 11 macam pajak daerah, termasuk sikap pajak hotel dan restoran, yang diatur dalam peraturan daerah. Pengaturan pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak air permukaan dan bawah tanah, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak wallet (Pengaturan ini sesuai dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000). Meskipun ada banyak jenis pajak, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menyetor pajak masih rendah. Hal ini di sebabkan keterbatasan pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak dari pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan, dengan adanya perubahan peraturan pajak yang cepat membuat pemilik usaha kesulitan dalam membuat Laporan keuangan yang tepat dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan dapat membuat kinerja UMKM berkelanjutan kesulitan untuk memahami hal tersebut.

Menurut Fitriyah (2024) Kinerja UMKM berkelanjutan adalah hasil kerja yang dicapai UMKM secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Kinerja ini dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti laba, omset, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kinerja UMKM yang berkelanjutan penting karena dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. kinerja UMKM berkelanjutan dapat diukur melalui beberapa indikator yang menunjukkan seberapa baik suatu usaha beroperasi, antara lain: peningkatan laba, pengurangan biaya operasional, dan jangka waktu usaha/ketahanan bisnis. Kinerja UMKM berkelanjutan di Kabupaten Dompu melibatkan berbagai faktor seperti inklusi dan literasi keuangan, serta manajemen keuangan yang baik program pemberdayaan dan dukungan dari pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi UMKM di daerah tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa inklusi finansial serta literasi keuangan Studi mengungkapkan bahwa hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dan akses kelayanan keuangan yang lebih baik. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Dompu.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1988) dan merupakan salah satu teori psikologi sosial yang paling banyak digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku mencerminkan pandangan positif atau negatif seseorang terhadap suatu tindakan. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh sosial atau dukungan dari lingkungan terhadap keputusan untuk berperilaku. Sementara itu, *perceived behavioral control* menggambarkan sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan atau melaksanakan perilaku tersebut berdasarkan sumber daya dan kendala yang mereka rasakan.

Dalam konteks perpajakan UMKM, TPB digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pelaku usaha memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk pencatatan transaksi yang sesuai dengan peraturan. Teori ini menekankan pentingnya pengetahuan, dukungan sosial, dan persepsi kontrol atas kemampuan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Jogiyanto (2007) menambahkan bahwa konstruk kontrol perilaku dalam TPB menjadi penting karena dapat menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu menjalankan tindakan tertentu meskipun dihadapkan pada hambatan.

Tiga bentuk keyakinan dalam TPB mencakup: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut; (2) *normative beliefs*, yakni keyakinan mengenai harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut; dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan terhadap adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat tindakan serta persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut (*perceived power*). Dengan demikian, TPB sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi terhadap kemudahan atau hambatan dalam menjalankan kewajiban pajak.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama dalam sistem *self-assessment* yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Menurut Shahnaz (2022), pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk proses dan alasan di balik kewajiban membayar pajak. Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman atas manfaat pajak dan peraturan yang berlaku, sedangkan Ermawati dan Afifi (2018) menambahkan bahwa hal ini juga mencakup pemahaman terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam aturan perpajakan.

Pengetahuan yang cukup akan membantu pelaku UMKM menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan pandangan Susanti et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memahami kewajiban mereka secara menyeluruh. Namun, Arfah dan Aditama (2020) mengingatkan bahwa dalam beberapa kasus, peningkatan pengetahuan justru dapat menurunkan kepatuhan jika tidak disertai dengan sikap positif terhadap pajak.

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Asis (2017) meliputi: (1) pemahaman terhadap fungsi pajak, (2) pemahaman prosedur pembayaran, (3) kesadaran terhadap sanksi perpajakan, dan (4) pengetahuan tentang lokasi pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang memadai menjadi kunci utama dalam mendorong perilaku patuh pada wajib pajak UMKM.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan fiskal yang dirancang untuk meringankan beban perpajakan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mereka dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih

mudah. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif, kemudahan administrasi, atau fasilitas pajak lainnya. Kebijakan insentif menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, insentif pajak dapat mempengaruhi *control beliefs* wajib pajak, karena persepsi terhadap kemudahan dan ketersediaan dukungan dari pemerintah dapat meningkatkan niat untuk patuh. Yuningsih et al. (2022) menyatakan bahwa keyakinan terhadap hasil yang baik dari kepatuhan, seperti keberlangsungan usaha dan stabilitas keuangan, dapat memperkuat niat pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajak.

Indikator insentif pajak menurut Larasati et al. (2021) mencakup: (1) motivasi pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif, (2) efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan, (3) manfaat insentif bagi wajib pajak, dan (4) keterlibatan pemerintah dalam menyosialisasikan regulasi terbaru. Dengan demikian, pemberian insentif yang tepat sasaran akan memperkuat kepatuhan dan daya saing UMKM.

Sikap Pajak

Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa (Robbins, 2001). Dalam konteks perpajakan, sikap wajib pajak mencerminkan penilaian mereka terhadap kebijakan, peraturan, dan sistem perpajakan yang berlaku. Salsabilla et al. (2022) menjelaskan bahwa sikap ini sangat menentukan dalam mendorong atau menghambat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Permasalahan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi isu krusial. Pertumbuhan UMKM yang signifikan belum diikuti oleh peningkatan kesadaran perpajakan. Faktor-faktor seperti kualitas sosialisasi dan pelayanan dari aparat pajak menjadi penentu penting dalam membentuk sikap wajib pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Selain itu, sikap terhadap sanksi, peraturan, dan administrasi perpajakan juga berpengaruh terhadap perilaku patuh.

Menurut Utomo (2019), indikator yang digunakan untuk mengukur sikap pajak meliputi: (1) sikap terhadap sanksi pajak, (2) sikap terhadap pelayanan pajak, (3) sikap terhadap peraturan perpajakan, dan (4) sikap terhadap administrasi perpajakan. Sikap yang positif terhadap aspek-aspek ini berpotensi besar meningkatkan kepatuhan dan kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan negara.

Kinerja UMKM Berkelanjutan

Kinerja UMKM berkelanjutan mencerminkan kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkembangan teknologi digital seperti QRIS telah mendorong efisiensi transaksi keuangan dan menjadi salah satu pendorong utama inovasi bisnis UMKM. Bank Indonesia (2024) mencatat pertumbuhan transaksi QRIS yang signifikan, yang tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional UMKM.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital payment berkontribusi positif terhadap kinerja UMKM (Gita Mairani, 2024; Umniya, 2023), meskipun terdapat pula temuan yang berbeda (Husnia, 2024; Tadius, 2021). Perbedaan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan sinergi antara literasi keuangan dan adopsi teknologi digital untuk memahami dampaknya terhadap keberlanjutan UMKM.

Indikator kinerja UMKM berkelanjutan meliputi: (1) aspek ekonomi, (2) aspek sosial, (3) aspek lingkungan, (4) aspek manajerial, dan (5) aspek keberlanjutan jangka panjang (Fitriyah, Purnomo, & Nugroho, 2024). Pengukuran yang komprehensif terhadap lima aspek ini penting dalam mengevaluasi daya saing dan ketahanan UMKM di tengah tantangan global dan domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data primer yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara objektif dan terukur menggunakan alat statistik. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Pasar Atas, Kabupaten Dompu, yang telah memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar secara resmi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu. Responden mengisi kuesioner secara mandiri dalam waktu yang telah ditentukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), insentif pajak (X2), dan sikap pajak (X3) terhadap kinerja UMKM berkelanjutan (Y). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada formulasi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Di mana Y merupakan kinerja UMKM berkelanjutan sebagai variabel dependen, α adalah konstanta, β_1 , β_2 , dan β_3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan e adalah error atau residu. Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kinerja UMKM.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji apakah suatu variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam hal ini, digunakan model regresi moderasi untuk melihat pengaruh interaksi antara penghindaran pajak (X1) dan kebijakan dividen (X2) terhadap nilai perusahaan (Y), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3(X_1 \times X_2) + e$$

Dalam model ini, X1 adalah variabel penghindaran pajak, X2 adalah kebijakan dividen, dan $X_1 \times X_2$ merupakan interaksi antara keduanya sebagai variabel moderasi. Nilai perusahaan diukur menggunakan rasio Tobin's Q. Uji hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif (H_1) diterima, dan jika lebih dari 0,05 maka H_1 ditolak. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran moderasi secara lebih mendalam dalam hubungan antar variabel yang diteliti

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,708	0,224	Valid
	X1.2	0,700	0,224	Valid
	X1.3	0,843	0,224	Valid
	X1.4	0,834	0,224	Valid
Insentif Pajak	X2.1	0,698	0,224	Valid
	X2.2	0,848	0,224	Valid
	X2.3	0,678	0,224	Valid
	X2.4	0,796	0,224	Valid
Sikap Pajak	X3.1	0,749	0,224	Valid
	X3.2	0,740	0,224	Valid
	X3.3	0,801	0,224	Valid
	X3.4	0,738	0,224	Valid
Kinerja UMKM Berkelanjutan	Y.1	0,558	0,224	Valid
	Y.2	0,618	0,224	Valid
	Y.3	0,615	0,224	Valid
	Y.4	0,689	0,224	Valid
	Y.5	0,597	0,224	Valid
	Y.6	0,732	0,224	Valid

Y.7	0,732	0,224	Valid
Y.8	0,808	0,224	Valid
Y.9	0,726	0,224	Valid
Y.10	0,790	0,224	Valid
Y.11	0,795	0,224	Valid

Sumber : Output SPSS Terlampir

Uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel yang diberikan kepada responden terbukti valid, karena nilai r hitung melebihi nilai r tabel sebesar 0,224. Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner dapat dianggap layak digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Langkah selanjutnya setelah memastikan bahwa seluruh item pernyataan layak digunakan sebagai instrumen penelitian adalah menguji reliabilitasnya. Suatu pernyataan dianggap reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas tersebut:

Hasil Uji Reliabilitas Item - Item Variabel Penelitian

Tabel 2 Uji Reliabilitaw

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.776	Reliabel
Insentif Pajak	0.745	Reliabel
Sikap Pajak	0.748	Reliabel
Kinerja UMKM Berkelanjutan	0.894	Reliabel

Merujuk pada Tabel 4.3 menyajikan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan Seluruh variabel yang dianalisis menunjukkan tingkat keandalan yang memadai, ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha yaitu diperoleh melebihi batas kriteria 0,6.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum atau ringkasan data berdasarkan nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), nilai maksimum, dan minimum. Hasil statistik deskriptif tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.":

Tabel 3 Uji Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	7	16	12,65	1,590
Insentif Pajak	7	16	12,43	1,832
Sikap Pajak	7	16	13,67	1,695
Kinerja UMKM Berkelanjutan	19	44	36,24	4,252

Sumber : Output SPSS Terlampir

Merujuk pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari variabel Pengetahuan Pajak adalah 12.65. Insentif Pajak adalah 12.43. Sikap Pajak adalah 13.67. Kinerja UMKM Berkelanjutan adalah 36.24.

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah data menentukan distribusi dari data yang diamati normal atau bukan.. Metode yang digunakan adalah Pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Perolehan melalui analisis normalitas tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 Uji Normalitas

Variabel	Sig	batas	Keterangan
Unstandar Residual	0.890	> 0,05	Normal

Sumber : Output SPSS Terlampir

Mengacu pada Tabel 4. nilai Asymp. Sig. diperoleh sebesar 0,890 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan tersebut terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik adalah adanya homoskedastisitas, yakni kondisi di mana varians dari error (gangguan) bersifat konstan pada setiap tingkat variabel bebas. Kesimpulan terhadap hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	batas	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.574	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Insentif Pajak	0.809	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sikap Pajak	0.340	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber : Output SPSS Terlampir

Mengacu pada Tabel berikut 5 terlihat anggapan utama signifikansi yang diperoleh melebihi angka 0,05. Oleh seperti itu, mampu di tarik simpulannya terutama Faktor-faktor dalam penelitian ini tidak memperlihatkan adanya indikasi heteroskedastisitas.

Uji Multikolineartias

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menilai ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dideteksi melalui nilai aktor Inflasi Varians (VIF) dan tingkat toleransi (α).

Tabel 6 Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.515	1.943	Tidak terjadi multikolinieritas
Insentif Pajak	0.401	2.495	Tidak terjadi multikolinieritas
Sikap Pajak	0.636	1.573	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Output SPSS Terlampir

Merujuk pada Tabel 4.4, terlihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang berada di bawah 10 menunjukkan bahwa model bebas dari indikasi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan beberapa pemeriksaan asumsi dasar bahwa bertujuan bagi memahami. Apakah terdapat hubungan antara error (kesalahan) pada periode t dengan error pada periode sebelumnya (t-1) dalam suatu model regresi linier. Jika ditemukan adanya hubungan tersebut, maka kondisi ini dikatakan sebagai masalah autokorelasi. Untuk mengidentifikasi autokorelasi, biasanya digunakan uji statistik Durbin-Watson (DW test). Namun, kelemahan utama dari uji ini adalah ketidakpastian dalam menentukan distribusi statistiknya secara akurat. Hasil uji Durbin-Watson (DW test) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Uji Autokorelasi

DU	DW	4-DU	Keterangan
1,709	2.002	2.291	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Output SPSS Terlampir

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh hasil Durbin-Watson (DW) senilai 2,002, yang ada di antara batas atas (du) sebesar 1,709 dan batas (4 - du) sebanding 2,291. Karena nilai DW berada dalam

kisaran tersebut ($du < DW < 4 - du$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Dalam analisis regresi linier berganda, pengujian dilakukan baik secara simultan melalui uji F maupun secara parsial melalui uji t. Adapun ketentuan dalam uji signifikansi untuk uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Hipotesis alternatif (H_a) diterima apabila nilai probabilitas (p) $\leq 0,05$, yang berarti bahwa variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun ringkasan dari hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	4.066			
Pengetahuan Pajak	0.734	2.971	0.004	Signifikan
Insentif Pajak	0.580	2.387	0.020	Signifikan
Sikap Pajak	1.147	5.500	0.000	Signifikan
F hitung	52.171			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.675			

Sumber : Output SPSS Terlampir

Mengacu pada Tabel berikut 4.6 menyajikan hasil perhitungan model regresi linier berganda diperoleh melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 21.0 for Windows, dengan hasil yang dirincikan sebagai berikut:

$$Y = 4.066 + 0.734 X_1 + 0.580 X_2 + 1.147 X_3 + e$$

1. Konstanta = 4.066

Artinya jika tidak ada variabel Pengetahuan Pajak, Insentif Pajak, dan Sikap Pajak yang mempengaruhi Kinerja UMKM Berkelanjutan, maka Kinerja UMKM Berkelanjutan sebesar 4.066 satuan.

2. $b_1 = 0.734$

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Pengetahuan Pajak akan meningkatkan Kinerja UMKM Berkelanjutan sebesar 0,734, dengan anggapan bahwa variabel independen yang lain tetap tidak berubah $b_2 = 0.580$

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Setiap tambahan satu satuan dalam variabel Insentif Pajak akan menyebabkan peningkatan Kinerja UMKM Berkelanjutan sebesar 0,580, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap konstan.

1. $b_3 = 1.147$

Dengan kata lain, peningkatan satu satuan pada variabel Sikap Pajak akan meningkatkan Kinerja UMKM Berkelanjutan sebesar 1,147, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan.

Hasil Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis / MRA)

Dalam model Analisis efek moderasi dilaksanakan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel moderasi memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi adalah sebagai berikut: a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_1 ditolak b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_1 diterima keterangan ketepatan; H_0 :

Berikut ini merupakan ringkasan hasil dari analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan.

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	12.074			
Pengetahuan Pajak	0.598	2.187	0.032	Signifikan
Insentif Pajak	0.902	3.622	0.001	Signifikan
Pengetahuan Pajak*Insentif Pajak	0.030	3.688	0.000	Signifikan
F hitung	39.3702			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.611			

Sumber : Output SPSS Terlampir

Mengacu pada Tabel 9 di atas, hasil perhitungan regresi moderasi yang dilakukan menggunakan program SPSS versi 21.0 untuk Windows menunjukkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 12.074 + 0.598 X_1 + 0.902 X_2 + 0.030 X_1 \times X_2 + e$$

1. Konstanta 12.074. Artinya, jika tidak ada variabel Pengetahuan Pajak, Insentif Pajak, dan sikap Pajak maka Insentif Pajak mempengaruhi Kinerja UMKM Berkelanjutan, sebesar 12.074 satuan.
2. $b_1 = 0.598$ Menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak Naik sebesar satu unit, maka kinerja UMKM Berkelanjutan akan bertambah sebesar 0,598 dengan mengendalikan variabel bebas lainnya
3. $b_2 = 0.902$ Menunjukkan bahwa Insentif Pajak bertambah satu unit, maka kinerja akan UMKM Berkelanjutan akan bertambah sebesar 0.902 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.
4. $b_3 = 0.030$ Menunjukkan bahwa variabel **Interaksi antara variabel Pengetahuan Pajak dan Insentif Pajak yang** peningkatan sebesar satu satuan pada variabel tersebut akan meningkatkan Kinerja UMKM Berkelanjutan sebesar 0,030, dengan catatan bahwa variabel independen lainnya berada dalam kondisi tetap.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0.675, artinya variabel Pengetahuan Pajak, Insentif Pajak, dan Sikap Pajak Secara simultan, variabel-variabel dalam model mampu memengaruhi Kinerja UMKM Berkelanjutan sebesar 67,5%, sementara sisanya, yaitu 32,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Simultan (F)

Berdasarkan hasil uji F yang tercantum dalam Tabel 4.6, diperoleh nilai F hitung sebesar 52,171 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Artinya, variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Pajak, Insentif Pajak, dan Sikap Pajak secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja UMKM Berkelanjutan.

Pengujian hipotesis parsial (Uji t)

1. Berdasarkan hasil pada tabel, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,004 \leq 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM Berkelanjutan.
2. Hasil pengujian mengindikasikan pula bahwa nilai signifikansi Insentif Pajak sebesar $0,020 \leq 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa Insentif Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM Berkelanjutan.

3. Selanjutnya, nilai signifikansi Sikap Pajak sebesar $0,000, \leq 0,05$, memperkuat bukti bahwa Sikap Pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja UMKM Berkelanjutan

PEMBAHASAN

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kinerja UMKM

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2023). menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang baik meningkatkan kepatuhan pada pelaku UMKM. Kepatuhan perpajakan memiliki peran penting dalam kepatuhan pajak yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak dituntut untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek-aspek perpajakan menjadi hal yang penting, khususnya terkait dengan ketentuan serta prosedur perpajakan. Pengetahuan ini membantu Wajib Pajak untuk menaati peraturan, karena mengandung ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya, pengetahuan tentang perpajakan memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya Mengacu pada peraturan yang berlaku guna mendorong peningkatan kepatuhan. Secara umum, individu yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih menyadari serta menjalankan hak dan kewajibannya tanpa dorongan dari sanksi atau hukuman. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang memadai. Biasanya lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hartono dalam studi yang dikutip oleh Amin Shahnaz (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman atau kesadaran wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, mencakup prosedur pelaporan serta informasi lain yang berkaitan dengan perpajakan. Pengetahuan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami alasan pentingnya membayar pajak dan menaati ketentuan hukum. Mengacu pada Theory of Planned Behavior, pemahaman tentang perpajakan sangat krusial bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, terlebih sejak Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai efektif pada 1 Juli 2013, mengatur ketentuan perpajakan khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengetahuan perpajakan turut berkontribusi secara signifikan karena pelaku UMKM dapat secara mandiri menghitung dan melaporkan pajak mereka. Dengan demikian, Semakin besar pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan juga akan semakin meningkat.

Pengaruh insentif pajak terhadap kinerja UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. berdasarkan pengujian hasil hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan kebijakan insentif pajak oleh pemerintah aka meningkatkan kinerja UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian UMKM sudah banyak yang mendapatkan insentif pajak dan merasakan dampak positif untuk kelangsungan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak terhadap kinerja UMKM dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak merupakan program kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib Pajak diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor tertentu. Namun, kebijakan insentif pajak yang telah diterapkan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak, terutama pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memahami keberadaan dan manfaat dari program insentif tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *planned behavior* yang dikemukakan oleh Sari (2022), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu tekanan atau pengaruh dari luar diri individu untuk bertindak sesuai harapan pihak lain. Dalam konteks ini, kebijakan insentif pajak menjadi faktor eksternal yang mendorong seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Idealnya, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Namun

kenyataannya, masih terdapat hambatan seperti kurangnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak kepada pelaku UMKM, sehingga tidak semua wajib pajak mengetahui dan memahami program insentif yang tersedia.

Pengaruh sikap pajak terhadap kinerja UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan Dimana hal ini memberikan dampak kepada kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak. Mengacu pada *theory of planned behavior* yang mana kepribadian seorang individu muncul akibat memiliki keinginan dalam melakukan yang mana keyakinan tersebut dipengaruhi oleh presumsi yang dimiliki pembayar pajak. Sehingga menunjukkan sikap pajak pajak didukung karena memberikan keuntungan maupun manfaat bagi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perilaku individu, Teori Tindakan yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior) menjelaskan supaya tindakan seseorang, termasuk tingkah laku kepatuhan pajak, terpengaruh oleh niat untuk bertindak. Niat ini terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Semakin kuat niat seseorang untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kesadarannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pada akhirnya, lingkungan sekitar individu turut memengaruhi perilaku tersebut. Jika lingkungan memberikan pandangan positif dan menilai pentingnya kepatuhan pajak, Dengan demikian, wajib pajak cenderung menunjukkan sikap patuh apabila memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Sebaliknya, apabila lingkungan menunjukkan sikap negatif terhadap kepatuhan, maka individu lebih mungkin terdorong untuk menghindari kewajiban pajaknya (Indrawan & Binekas, 2018).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen yang diteliti dengan kinerja UMKM. Pertama, pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku usaha, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlanjutan dan efektivitas operasional UMKM, karena pemahaman yang baik tentang sistem pajak membantu pelaku usaha dalam mengelola kewajiban fiskal secara efisien.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Insentif ini, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam bentuk keringanan atau kemudahan perpajakan, memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal dalam mengembangkan usahanya. Dalam konteks Theory of Planned Behavior (TPB), temuan ini mengindikasikan bahwa sikap positif pelaku usaha terhadap insentif pajak memengaruhi intensi dan tindakan mereka untuk terus mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Persepsi atas kemudahan yang diberikan mendorong keyakinan bahwa upaya perpajakan tidak menjadi beban, melainkan peluang untuk tumbuh.

Terakhir, sikap wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Sikap ini mencerminkan sejauh mana pelaku usaha memiliki komitmen dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diterima dari petugas pajak (fiskus). Ketika fiskus menunjukkan kompetensi melalui pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang memadai mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan, hal ini membangun kepercayaan pelaku usaha dan meningkatkan kepatuhan mereka. Dengan demikian, kualitas interaksi antara pelaku usaha dan otoritas pajak menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat keberlanjutan dan performa UMKM secara keseluruhan.

REFERENSI

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109: 1069-1075.
- Sari, V.A.P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2): 744-760.
- Fitriyah, Lailatul, Arie Setyo Purnomo, and Prasetyo Nugroho. 2024. "Pengaruh Financial Literacy Dan Digital Payment (QRIS) Terhadap Kinerja Berkelanjutan UMKM Madura." 4(1):2146–64.
- Manufaktur, Perusahaan, and Efek Indonesia. 2020. "Pengaruh Insentif Pajak , Pajak , Dan Cash Flow Terhadap Konservatisme." 1(Januari):10–23.
- Mahyarni, M. (2013). Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), suska.ac.id/index.php/elriyasaah/article/view/1713. <http://ejournal.uin>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi terbaru*. Andi Offset.
- Nyoman, N., Seni, A., Made, N., & Ratnadi, D. (2017). THEORY OF PLANNED BEHAVIOR UNTUK MEMPREDIKSI NIAT BERINVESTASI. In *Bisnis Universitas Udayana (Vol. 6)*.
- Pratama, A. (2018). Individual Taxpayer Characteristics and Taxpayer Knowledge: Exploratory Survey on Individua Taxpayer in Bandung City, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research Online CDROM*, 7 (1). <https://doi.org/2304-1013>
- Rokhayati, (2015). *Pengukuran Kinerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).SUATU TELAAH PUSTAKA*.
- Salsabilla, Putri, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi, and Rai Gina Artaningrum. 2022. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata* Vol. 7(No. 1):40–48.
- Sandi, F. B. (2019). 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya. Retrieved December 16, 2020, from Online-Pajak website: <https://www.onlinepajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umk>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti Susanti, Joni Susilowibowo, and Han Tantri Hardini. 2020. "Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11(2):420–31. doi: 10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25.
- Susbiyani, A., Yurisma, N. N., & Nuha, G. A. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Banyuwangi.
- Utomo, B. A. (2018). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi Institutional Repository Uin Syarif Hidayatullah, Tangerang.